

PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM

POLITICS PARTY AND GENERAL ELECTION

Winasis Yulianto¹⁾, Dyah Silvana Amalia²⁾

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

¹Email: winasis3103@gmail.com

Abstrak Sebagai wujud dari ide kedaulatan rakyat, dalam sistem demokrasi harus dijamin bahwa rakyat terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan. Demokrasi perwakilan sebagai sistem demokrasi modern terdiri dari 3 macam: Demokrasi dengan sistem parlementer, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan, demokrasi yang dikontrol oleh rakyat secara langsung melalui referendum dan inisiatif. Salah satu konsekuensi dari pelaksanaan demokrasi perwakilan adalah adanya jarak antara rakyat yang berdaulat dengan pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan kedaulatan tersebut. Tanpa adanya jaminan mekanisme partisipasi rakyat dalam negara sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat, konsep kedaulatan dapat dikebiri dan terjebak dalam pengertian kedaulatan rakyat yang totaliter. Untuk itu, diperlukan instrumen maupun menjembatani rakyat dengan wakil-wakilnya baik di parlemen maupun yang duduk sebagai pejabat publik pemerintahan yang demokratis membutuhkan mekanisme dan institusi bagi ekspresi dari kehendak yang diwakili. Jika tidak demikian, sistem perwakilan dapat berubah menjadi manipulasi dan paksaan.

Kata Kunci: Partai Politik, Pemilihan Umum

Abstract As a manifestation of the idea of popular sovereignty, in a democratic system it must be guaranteed that the people are fully involved in planning, organizing, implementing and supervising and assessing the implementation of the functions of power. Representative democracy as a modern democratic system consists of 3 types: Democracy with a parliamentary system, democracy with separation of powers, democracy controlled by the people directly through referendums and initiatives. One of the consequences of the implementation of representative democracy is that there is a distance between the sovereign people and the government formed to exercise this sovereignty. Without a guaranteed mechanism for people's participation in the state as a form of implementing people's sovereignty, the concept of sovereignty can be emasculated and trapped in a totalitarian sense of popular sovereignty. For this reason, instruments and bridges are needed for the people and their representatives, both in parliament and those who sit as public officials, a democratic government requires mechanisms and institutions for the expression of the will that is represented. Otherwise, the representational system may turn into manipulation and coercion.

Keywords: Politics Party, Generral Election

PENDAHULUAN

Untuk menjembatani kesenjangan antara pemerintah dan rakyat, sebagai wujud dari bekerjanya demokrasi, diperlukan partai politik. Sistem demokrasi tidak dapat bekerja tanpa partai politik. Pengambilan keputusan secara teratur hanya mungkin jika ada organisator yang didasarkan pada tujuan negara. Pengambilan keputusan secara teratur hanya mungkin jika ada organisator yang didasarkan pada tujuan negara.

Tugas partai politik adalah mengorganisir aspirasi masyarakat menjadi opini publik yang lebih sistematis sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan secara teratur. Dalam negara modern, jumlah pemilih sangat besar dan kepentingannya beragam sehingga perlu dikelola untuk menjadi keputusan. Dengan demikian, partai politik berperan besar dalam proses seleksi, baik pejabat maupun substansi kebijakan. Oleh karena itu, partai politik memiliki posisi dan peran penting dalam sistem demokrasi. Partai memiliki peran penghubung yang sangat strategis antara proses pemerintahan dan warga negara bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebenarnya menentukan demokrasi.

Dalam sistem demokrasi perwakilan, dipahami secara umum bahwa partisipasi rakyat yang berdaulat terutama disalurkan melalui pemilihan umum untuk membentuk lembaga perwakilan. Mekanisme perwakilan ini sendiri dianggap efektif untuk menjamin keterwakilan aspirasi atau kepentingan rakyat. Oleh karena itu, dalam sistem perwakilan posisi dan peran partai politik dianggap dominan.

Sebagai sarana komunikasi politik, partai memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengartikulasikan kepentingan politik yang terkadang tersembunyi di masyarakat. Terkait dengan sosialisasi politik, partai juga memiliki peran yang sangat penting dalam rangka pendidikan politik.

Fungsi partai politik adalah partai dibentuk untuk menjadi wahana hukum dalam memilih kader-kader pemimpin negara pada tingkat dan jabatan tertentu. Tentu tidak semua posisi bisa diisi oleh peran partai politik. Fungsi keempat partai politik, jika partai politik banyak maka berbagai kepentingan tersebut dapat

disalurkan melalui partai politik yang menawarkan ideologi, program dan alternatif kebijakan yang berbeda.

Berdasarkan uraian di pendahuluan di atas, dapat dipahami bahwa partai politik mempunyai kedudukan yang penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, sosialisasi ini hendak menunjukkan hubungan penting antara partai politik dan pemilihan umum.

METODE

Politik bukan hanya milik orang kota saja, yang memiliki pendidikan tinggi, politik juga milik orang desa yang jauh dari kota, dan tidak berpendidikan. Hal ini bisa kita buktikan bilamana ada kerumunan orang di pojok desa, atau di tempat-tempat becak dan ojek mangkal. Seringkali, kerumunan tersebut sedang membicarakan politik.

Atas fakta yang demikian, kami sebagai akademisi, menganggap perlu untuk memberikan pemahaman secara baik dan benar bahwa ada hubungan yang erat antara partai politik dan pemilihan umum.

Penyuluhan atau sosialisasi ini dilakukan di Kantor Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Pembicara atau yang memberikan materi sosialisasi dua orang dosen Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yaitu:

1. Dr. Winasis Yulianto, SH., M.Hum, ahli Hukum Tata Negara;
2. Dyah Silvana Amalia, ahli Hukum Internasional.

Sosialisasi dilaksanakan di Kantor Desa Sumberkolak pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 mulai pukul 19.00 sampai selesai. Peserta sosialisasi adalah masyarakat desa sumberkolak yang dipilih oleh aparat desa Sumberkolak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Introduksi

Partai politik memiliki peran yang sangat strategis dan sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Bahkan ada ahli yang menyatakan bahwa partai politiklah yang sebenarnya menentukan demokrasi. Namun ada juga yang berpendapat bahwa partai politik merupakan alat atau kendaraan bagi elit untuk

mempeoleh kekuasaan. Partai politik juga dapat dipergunakan untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik tertentu atau kepentingan umum.

Oleh karena itu, sistem kepartaian yang baik sangat menentukan bekerjanya sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip *checks and balances*. Dalam sistem demokrasi dengan banyak partai politik, aneka ragam aspirasi dan kepentingan politik yang saling berkompetensi dalam masyarakat memerlukan penyaluran yang tepat. Semakin besar yang dapat dimobilisasikan oleh dan disalurkan melalui suatu partai politik, semakin besar pula potensi partai politik itu untuk disebut terlembagakan secara tepat.

Fungsi Partai Politik

Fungsi partai politik adalah sebagai sarana untuk komunikasi, sosialisasi dan rekrutmen politik serta sebagai pengatur konflik. Keempat fungsi tersebut sama-sama terkait satu sama lainnya. Sebagai sarana komunikasi politik, partai berperan sangat penting dalam upaya mengartikulasikan kepentingan atau *political interest* yang terdapat atau kadang-kadang tersembunyi dalam masyarakat. Berbagai kepentingan itu diserap sebaik-baiknya oleh partai politik menjadi ide-ide, visi, dan kebijakan-kebijakan partai politik yang bersangkutan. Setelah itu, ide-ide, visi dan kebijakan tersebut diadvokasi sehingga menjadi kebijakan negara.

Terkait dengan sosialisasi politik, partai politik juga berperan penting dalam melakukan sosialisasi politik. Ide, visi dan kebijakan yang menjadi pilihan partai politik, dimasyarakatkan ke konstituen untuk mendapatkan *feedback* berupa dukungan dari masyarakat luas. Terkait dengan sosialisasi politik ini, partai juga berperan penting dalam pendidikan politik. Partailah yang menjadi struktur antara yang harus memainkan peran dalam membumikan cita-cita negara dalam kesadaran kolektif masyarakat warga negara.

Fungsi ketiga partai politik adalah sarana rekrutmen politik. Partai politik dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Kader-kader itu ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan ada

pula yang tidak dipilih secara langsung. Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara langsung oleh rakyat, sedangkan Menteri dipilih secara tidak langsung oleh rakyat.

Fungsi keempat partai politik adalah pengatur dan pengelola konflik dalam masyarakat. Sebagai pengatur dan pengelola konflik dalam masyarakat, partai politik berperan sebagai agregasi kepentingan yang menyalurkan berbagai kepentingan melalui saluran kelembagaan politik partai.

Pemilihan Umum Dan Kedaulatan Rakyat

Dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap pemilik dan pemegang kedaulatan. Rakyatlah yang memegang corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah yang menentukan tujuan negara dan pemerintahan itu diselenggarakan. Namun dalam pelaksanaannya, negara dengan jumlah rakyat yang banyak, tidak mungkin untuk menghimpun pendapat rakyat secara langsung. Oleh karena itulah, kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan sistem perwakilan.

Dalam kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan, juga disebut demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung. Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat. Agar wakil-wakil rakyat tersebut dapat bertindak atas nama rakyat, maka wakil-wakil rakyat itu dipilih sendiri oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Peserta pemilihan umum dapat bersifat kelembagaan atau perorangan. Tetapi meskipun perorangan, biasanya mesin politik untuk mendukung kegiatan tersebut adalah kelembagaan, dalam hal ini partai politik. Oleh karena itu partai politik berkaitan erat dengan pemilihan umum. Bahkan dapat dikatakan bahwa partai politik merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi perwakilan.

Pentingnya pemilihan umum diselenggarakan secara berkala dikarenakan:

1. Pendapat atau aspirasi rakyat bersifat dinamis;
2. Kondisi kehidupan masyarakat dapat pula berubah;
3. Perubahan aspirasi pendapat rakyat bisa berubah karena jumlah penduduk yang bertambah atau masyarakatnya bertambah dewasa

4. Pergantian pimpinan negara secara teratur.

Kegiatan pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana untuk menyalurkan hak asasi warga negara. Oleh karena itu negara harus menjamin pemilihan umum secara periodik dan sesuai jadwal yang ditentukan. Dalam sistem demokrasi modern, legalitas dan legitimasi pemerintahan merupakan faktor yang sangat penting. Di satu pihak pemerintahan haruslah terbentuk berdasarkan ketentuan hukum dan konstitusi, sehingga dapat dikatakan memiliki legalitas. Tujuan pemilihan umum adalah:

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat;
- d. Untuk melaksanakan prinsip hak asasi warga negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pemilihan umum merupakan sarana yang tepat dalam menentukan Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota. Hal ini merupakan peningkatan fungsi lembaga negara, yang berarti negara semakin mengalami kemajuan.
- b. Penyelenggara pemilihan umum dilaksanakan oleh lembaga yang independen, yang dibantu oleh: Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Jimly Assiddiqie. 1993. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksananya Di Indonesia*. Jakarta: Ichiyar Baru van Hoeve.
- Jimly Assiddiqie. 1998. Pergumulan Peran Pemerintah dan Paremen dalam sejarah, Undang-Undang Dasar 1945: Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Indonesia. Jakarta.
- Jimly Assiddiqie. 2005. *Konstitusi dan Konstitualisme*. Jakarta: Konpress.
- Lord Halisham. 1978. *The Dilemma of Democrazy*. Collyns.